



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU PURBOWASITO SETYO WASKITO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 404665

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.070.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m²/33 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 860.000.000
4. Tanah Seluas 350 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 255.100.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, WULING ALVEZ Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 15.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 19.137.929

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.359.337.929

III. HUTANG

Rp. 430.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.929.337.929



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.